

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan landasan yuridis yang telah diamanatkan oleh Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II secara proporsional perlu diwujudkan dengan pembagian sumber daya nasional yang berkeadilan dan adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ketetapan MPR tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejak lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreatifitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya.

Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintah, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di andalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (Siahaan, 2010:1)

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Rudy Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development CTD*). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan

wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Sedangkan pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan, pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, *artshop*, *money changer*, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan jenis produk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Menurut Salah Wahab (2003):

Tourism Management pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri .

Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, dan tentunya pendapatan perkapita.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, bahkan mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Berikut daftar Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dalam delapan tahun terakhir:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2005-2012
(dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi	Persentase Pertumbuhan
2005	225.596.438.613,00	-
2006	253.882.919.542,87	12,54%
2007	287.249.534.044,93	13,14%
2008	314.627.155.412,30	9,53%
2009	360.152.627.690,00	14,45%
2010	440.331.559.083,00	22,26%
2011	803.663.585.485,00	82,51%
2012	1.001.806.364.114,00	24,65%

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak (2013) (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari tahun 2003-2012 berfluktuatif setiap tahunnya.

Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rio Hadi Putra, yang berjudul Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Besarnya Belanja Operasional Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung (2010), mengemukakan bahwa besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan daerah khususnya untuk belanja operasional. Namun pada kenyataannya besarnya Pendapatan Asli Daerah belum dapat memenuhi kebutuhan belanja operasional daerahnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja operasional hanya sebagian kecilnya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja operasional daerah untuk tiga tahun dari tahun 2006, 2007, 2008 yaitu sebesar 6,58%, 6,53%, dan 7,16%. Dari kontribusi tersebut dapat dilihat bahwa Kota Bandung masih

Rita Purnamasari, 2013

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

belum mampu memenuhi kebutuhan belanja operasional daerahnya, meskipun Pendapatan Asli Daerah untuk setiap tahunnya meningkat tapi belum mampu mengimbangi besarnya peningkatan belanja operasional daerahnya. Dengan demikian Pemerintah Daerah belum dapat mengurangi kebutuhan akan belanja operasional yang mana setiap tahun mengalami peningkatan.

Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia Hal ini ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Bandung dalam ajang “*Indonsian Tourism Award*” sebagai kota tujuan wisata terfavorit tahun 2010. (Kompas.com, 2010).

Berdasarkan LKPJ Kota Bandung (2011) Sektor pariwisata merupakan andalan sektor jasa Kota Bandung yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Bandung. Bandung sebagai kota kreatif merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Bandung ditetapkan sebagai destinasi sekunder. Berada di tempat ke-empat, di bawah Jakarta dan Bali sebagai destinasi primer di Indonesia, dan destinasi Borobudur-Yogya-Solo Pada tahun 2011, Kota Bandung telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat (KPPN Bandung Kota dan sekitarnya) dan merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN Bandung–Ciwidey dan sekitarnya).

Dada Rosada sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Bandung mengatakan bahwa potensi wisata Kota Bandung memiliki nilai jual yang tinggi dan hal tersebut dicirikan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Dada hingga triwulan III tahun 2012, wisatawan yang berkunjung melalui gerbang kedatangan mencapai 3,8 juta dan 45% dari wisatawan tersebut atau sekitar 1,9 juta berstatus menginap. (portalbandung.com, 2012)

Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung berdasarkan data dari dinas pariwisata kota Bandung pada tahun 2005-2012:

Tabel 1.2
Data kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung
Tahun 2005 – 2012

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah Wisatawan
2005	91.350	1.837.500	1.928.850
2006	94.600	1.925.000	2.019.600
2007	137.268	2.420.105	2.557.273
2008	175.111	4.320.134	4.495.245
2009	185.076	4.822.532	5.007.608
2010	228.449	4.951.439	5.179.888
2011	225.585	6.487.239	6.712.824
2012	176.855	5.257.439	5.257.439

Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung (2013)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik objek wisata ke Kota Bandung pada tahun 2003-2011 mengalami trend meningkat, sedangkan pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan menurun.

Keragaman produk dan potensi pariwisata yang ada ditambah dengan tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti penginapan,

fasilitas rekreasi, tempat dan atraksi wisata, merupakan aset pariwisata yang besar dan dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan industri pariwisata bagi Kota Bandung.

Berdasarkan data dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung (2012), jumlah hotel yang telah berdiri mencapai 250 unit dengan total 11.000 kamar. Namun, jumlah itu dinilai masih kurang sehingga rencananya, Pemkot akan menambah kebutuhan tersebut hingga 270 unit atau menambah 14.000 kamar hotel. Wiyasa (2010:3) menyatakan bahwa:

Industri perhotelan merupakan bagian dari industri pariwisata yang memiliki arti penting, terutama bila dikaji dari aspek ekonomi. Industri perhotelan ini secara ekonomi dapat membrikan kontribusi yang berarti untuk perekonomian terutama untuk pajak penghasilan, pajak pembangunan I, dan pajak bumi dan bangunan.

Hotel berfungsi bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar, atau sekedar untuk mendapatkan ketenangan. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah kamar hotel berbintang maupun melati yang terjual di Kota Bandung mengalami peningkatan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menyatakan bahwa sekitar Rp98 miliar pendapatan asli daerah Kota Bandung disumbang dari sektor pariwisata. Ini bisa dilihat dari kunjungan turis pada saat *weekdays* yang mencapai 200 orang dan pada *weekend* jumlahnya naik berlipat ganda. Tentunya jumlah itu mengindikasikan kita sangat butuh penambahan jumlah kamar hotel. (seputar-indonesia.com, 2012). Pada 2012, 69% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Bandung berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yakni hotel, restoran, dan lain-lain. (Okezone.com, 2013).

Dengan banyaknya potensi obyek wisata yang ada ditambah fasilitas penunjang pariwisata lainnya dan banyaknya obyek wisata yang ditawarkan Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD melalui Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran. Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjugan wisatawan terhadap Pajak Hiburan
2. Bagaimana pengaruh jumlah kunjugan wisatawan terhadap Pajak Hotel
3. Bagaimana pengaruh jumlah kunjugan wisatawan terhadap Pajak Restoran
4. Bagaimana pengaruh jumlah kunjugan wisatawan terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak Hiburan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap Pajak Hotel di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak Restoran di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, melainkan harus pula memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis yang berupa sumbangan penelitian bagi ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik dengan kajian pentingnya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

dengan pengelolaan penerimaan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini antara lain sebagai bahan informasi bagi pengembangan sektor pariwisata antara lain:

- a. Sumbangan pemikiran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata dengan mempertimbangkan pendapatan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.
- b. Bahan masukan bagi tingkatan manajerial pemerintah, dalam membuat pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada periode selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan industri pariwisata, melalui penerimaan pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
- c. Bahan acuan bagi siapa saja yang tertarik dengan masalah ini sebagai manivestasi dari ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
- d. Masukan bagi pemerintah Kota Bandung khususnya dalam rangka menggali potensi pariwisata dan perbaikan industri pariwisata sebagai salah satu sumber potensial bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.